



Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Heniwati Gulo

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail : henygulo75@gmail.com

Abstrak

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Tiap tahunnya PDRB selalu mengalami kenaikan, tetapi persentase perubahannya berfluktuasi, hal ini perlu upaya Pemerintah dalam meningkatkan PDRB di kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data panel di 25 kabupaten dan 8 kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019 dengan melakukan uji chow, uji hausman dan uji LM dalam menentukan model regresi yang terbaik. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu melakukan peninjauan terkait pengelolaan keuangan dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan penggunaan anggaran terkait DAK dan DBH disetiap kabupaten/kota.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini pada daerah kabupaten/kota masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pembangunan ekonomi daerah memiliki hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber daya yang ada, peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dengan menetapkan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing secara efektif dan efisien, guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang cakupannya berbagai perubahan struktur sosial yang mendasar. disamping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, sikap-sikap masyarakat institusi nasional pula melakukan pengentasan kemiskinan, penanganan ketimpangan pendapatan, serta penyesuaian sosial/perubahan total suatu masyarakat menuju lebih baik secara keseluruhan (Todaro dalam Ladjin, 2022).

Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Saat ini, pemerintah pusat tengah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur

merupakan komponen fundamental ekonomi dan aspek penting dari pemerataan pembangunan dan kemakmuran di berbagai kondisi daerah. Infrastruktur juga berdampak besar pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan sosial, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan riil (Atmaja & Mahalli, 2015). Pada dasarnya tentunya setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan terjadinya perubahan struktur ekonomi sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat dilihat dari perkembangan PDRB (Ramadhan et.al., 2022).

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah-daerah. dengan cara meredistribusi pendapatan bruto dan kekayaan dalam menambah tingkat output. PDRB sangat mempengaruhi perekonomian jika PDRB menurun menyebabkan

ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. PDRB sendiri tidak lepas dari tiga pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran yang di kelola daerah (Anwar et al., 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah PDRB adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam perekonomian. Artinya kenaikan PDRB juga mencerminkan peningkatan remunerasi faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Ada dua cara dalam perhitungan PDRB, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan merupakan harga tiap tahun dan menunjukkan pendapatan yang mungkin dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan PDRB yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu dan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun (MS, 2017).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi sumber daya alam. Saat ini, Pemerintah daerah terlalu bergantung pada DAU dan DBH untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan pendapatan dan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini berdampak pada kurangnya kemampuan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah yang menjadi sumber PAD dan PDRB. Pengelolaan PAD, DAU dan DBH sangat mempengaruhi belanja daerah dan proses pembangunan daerah melalui program maupun kegiatan terutama dalam meningkatkan PDRB daerah.

Salah satu indikator dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi PAD terhadap APBD (Murniasih & Mulyadi, 2011). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam merencanakan pembangunan

dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonominya secara efektif, yaitu besarnya kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, di mana PAD harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari DAU dan DBH keuangan pusat dan daerah tahun 2019.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya mealui pendapatan asli daerah. Berbagai tuntutan dalam peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Tabel 1. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Milyar Rupiah)

No.	Kabupate/Kota	2017	2018	2019
1	Nias	2325,01	2440,16	2563,03
2	Mandailing Natal	8416,50	8904,14	9376,46
3	Tapanuli Selatan	8748,18	9201,96	9683,66
4	Tapanuli Tengah	6348,44	6678,25	7024,15
5	Tapanuli Utara	5280,69	5510,19	5764,94
6	Toba Samosir	5001,43	5249,25	5503,76
7	Labuhan Batu	21048,17	22112,34	23232,71
8	Asahan	23525,35	24844,87	26245,24
9	Simalungun	24715,67	25996,21	27348,7
10	Dairi	5968,81	6267,82	6569,81
11	Karo	13145,85	13744,17	14376,28
12	Deli Serdang	64991,87	68341,00	71878,69
13	Langkat	26822,60	28170,08	29597,77
14	Nias Selatan	3826,62	4018,74	4221,04
15	Humbang Hasundutan	3756,66	3946,12	4141,1
16	Pakpak Bharat	760,55	805,01	852,30
17	Samosir	2776,85	2931,70	3098,74
18	Serdang Bedagai	17516,43	18421,38	19393,39
19	Batu Bara	22034,26	22998,60	23998,59
20	Padang Lawas Utara	7378,98	7791,05	8228,45
21	Padang Lawas	7110,25	7534,3	7959,31
22	Labuhanbatu Selatan	16907,59	17797,95	18750,16
23	Labuanbatu Utara	15602,05	16413,33	17259,19
24	Nias Utara	2134,49	2228,75	2332,44
25	Nias Barat	1126,19	1179,91	1236,73
26	Sibolga	3224,58	3393,91	3570,33
27	Tanjungbalai	5174,85	5473,63	5790,37
28	Pematangsiantar	8750,15	9170,19	9611,74
29	Tebing Tinggi	3575,51	3760,50	3954,03
30	Medan	139739,34	148007,14	156780,58
31	Binjai	7309,57	7708,59	8133,54
32	Padangsidempuan	3830,32	4038,93	4261,32
33	Gunungsitoli	3049,12	3232,97	3428,45

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan per kapita tertinggi

selama 2017-2019 dimiliki oleh Kota Medan dengan PDRB per kapita pada tahun 2017 sebesar 139739,34 milyar rupiah. Tahun 2018 dengan PDRB per kapita sebesar 148007,14 milyar rupiah dan tahun 2019 dengan PDRB per kapita sebesar 156780,58. Sedangkan , PDRB per kapita terendah selama 2017-2019 dimiliki oleh Kabupaten Pakpak Bharat dengan PDRB per kapita pada tahun 2017 sebesar 760,55 milyar rupiah. Tahun 2018 dengan PDRB per kapita sebesar 805,01 milyar rupiah dan tahun 2019 PDRB per kapita sebesar 852,30 milyar rupiah. Setiap daerah kabupaten/kota memiliki kenaikan PDRB berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari kemampuan kabupaten/ kota masing-masing daerah yang kurang maksimal dan seimbang dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada.

Tabel 2. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Rp 000)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Nias	95,726,168	88,754,606	107,629,139
2	Mandailing Natal	80,581,689	84,809,924	98,758,815
3	Tapanuli Selatan	104,722,614	140,044,217	167,458,158
4	Tapanuli Tengah	72,710,309	76,660,883	88,441,123
5	Tapanuli Utara	162,441,906	105,656,763	120,736,498
6	Toba Samosir	54,840,824	52,298,961	68,042,531
7	Labuhan Batu	124,674,017	162,794,472	175,335,686
8	Asahan	123,687,305	142,972,040	149,647,050
9	Simalungun	252,663,016	164,107,850	191,940,130
10	Dairi	128,489,751	73,906,825	74,360,339
11	Karo	157,866,721	159,189,197	117,683,658
12	Deli Serdang	849,286,151	729,648,595	825,375,281
13	Langkat	139,717,648	136,680,579	167,523,077
14	Nias Selatan	18,450,267	19,605,735	25,664,884
15	Humbang Hasundutan	85,598,357	92,735,854	73,757,932
16	Pakpak Bharat	29,320,487	20,061,208	33,915,958
17	Samosir	72,228,748	47,440,830	60,497,451
18	Serdang Bedagai	103,711,290	194,076,711	143,144,171
19	Batu Bara	66,944,639	64,359,391	129,221,847
20	Padang Lawas Utara	74,524,920	74,306,098	42,929,112
21	Padang Lawas	46,509,730	47,455,309	52,067,312
22	Labuhanbatu Selatan	84,964,451	52,209,769	75,687,648
23	Labuanbatu Utara	52,690,086	57,010,691	70,122,563
24	Nias Utara	20,107,247	50,395,505	57,961,364
25	Nias Barat	36,239,997	40,193,008	18,411,236
26	Sibolga	103,672,204	81,245,734	69,311,245
27	Tanjungbalai	65,108,267	74,435,278	63,721,316
28	Pematangsiantar	81,112,898	137,052,839	125,343,187
29	Tebing Tinggi	113,222,875	114,048,354	105,239,919
30	Medan	1,739,756,924	1,636,204,515	1,829,665,882
31	Binjai	139,217,622	135,870,920	108,954,526
32	Padangsidempuan	109,650,318	75,063,576	87,432,283
33	Gunungsitoli	29,769,903	29,456,355	32,209,064

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas, PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama 2017-2019. Pada tahun 2017 Kota Medan memiliki PAD sebesar Rp 1.739.756.924.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 18.450.267.000. Tahun 2018, PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.829.665.882.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp

19.605.735.000. Sedangkan tahun 2019, PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.636.204.515.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 18.411.236.000. Namun, secara nyatanya bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara masih tinggi ketergantungan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Tercatat rata-rata rasio PAD lingkup Provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 19,51%. Artinya 33 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih ketergantungan sebesar 74,51% terhadap dana transfer dari pusat untuk membiayai belanja Pemerintah daerah (Kantor & Djpb, 2020).

Tabel 3. DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Rp 000)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Nias	425,974,369	428,647,259	443,235,113
2	Mandailing Natal	777,487,741	783,200,132	816,400,130
3	Tapanuli Selatan	644,304,467	642,196,019	676,183,229
4	Tapanuli Tengah	622,385,030	627,027,553	670,689,528
5	Tapanuli Utara	639,394,068	639,394,068	659,877,311
6	Toba Samosir	528,490,802	528,490,802	548,690,496
7	Labuhan Batu	684,408,474	680,408,474	686,644,553
8	Asahan	875,860,020	877,794,638	917,363,719
9	Simalungun	1,209,194,704	1,177,957,174	1,239,639,944
10	Dairi	612,745,792	612,742,762	629,145,028
11	Karo	738,378,312	738,378,312	758,968,872
12	Deli Serdang	1,468,561,952	1,468,561,952	1,513,584,154
13	Langkat	1,179,392,864	1,179,392,864	1,229,427,123
14	Nias Selatan	538,282,603	556,174,151	588,723,530
15	Humbang Hasundutan	523,818,445	523,818,445	536,163,886
16	Pakpak Bharat	338,611,130	339,271,690	354,721,524
17	Samosir	453,737,230	453,737,230	465,249,052
18	Serdang Bedagai	763,717,409	763,943,386	798,240,981
19	Batu Bara	602,464,355	602,464,355	628,895,139
20	Padang Lawas Utara	537,469,609	537,455,568	554,953,633
21	Padang Lawas	520,974,737	521,562,942	541,104,708
22	Labuhanbatu Selatan	504,525,796	504,525,796	522,907,314
23	Labuanbatu Utara	588,021,836	588,021,836	611,629,351
24	Nias Utara	411,036,299	413,338,900	429,134,187
25	Nias Barat	344,492,409	347,722,710	359,696,030
26	Sibolga	405,554,215	405,554,215	422,054,364
27	Tanjungbalai	415,172,063	418,666,416	446,820,629
28	Pematangsiantar	583,106,207	583,106,207	616,197,680
29	Tebing Tinggi	423,310,733	425,818,195	444,388,755
30	Medan	1,583,624,375	1,583,624,375	1,660,238,913
31	Binjai	564,377,582	564,377,582	585,637,664
32	Padangsidempuan	498,768,033	498,221,822	524,337,438
33	Gunungsitoli	426,630,977	426,758,929	446,102,654

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel 3 diatas, DAU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama 2017-2019. Pada tahun 2017, DAU tertinggi dimiliki oleh Kota Medan sebesar Rp 1.583.624.375.000. dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 338.611.130.000. Tahun 2018, DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.583.624.375.000 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 339.271.690.000. Sedangkan tahun 2019, DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.660.238.913.000 dan DAU terendah diperoleh

oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 354.721.524.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Seberapa besar DAU yang di terima oleh pemerintah daerah tergantung dari pemerintah pusat karena Dana Alokasi Umum itu sendiri bersumber dari APBN.

Tabel 4. DBH Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Rp 000)

No.	Kabupate/Kota	2017	2018	2019
1	Nias	11324211	12817669	10246815
2	Mandailing Natal	21320772	32375811	21164560
3	Tapanuli Selatan	28424393	132669294	131936862
4	Tapanuli Tengah	18329699	19191006	14239526
5	Tapanuli Utara	28249356	37516300	28884659
6	Toba Samosir	17149586	18857853	14464688
7	Labuhan Batu	47660136	49145610	41210425
8	Asahan	56352184	65622111	52397431
9	Simalungun	37920175	52459061	39021977
10	Dairi	16430938	17995912	14382315
11	Karo	17886341	17918854	13402130
12	Deli Serdang	59487838	68494799	56209665
13	Langkat	183357717	149525893	149951497
14	Nias Selatan	12026892	15868595	11877259
15	Humbang Hasundutan	13642099	15845294	11626179
16	Pakpak Bharat	10454613	14284922	10992927
17	Samosir	12772633	14543957	11061424
18	Serdang Bedagai	36188807	43952778	38160916
19	Batu Bara	23679312	31051731	26811216
20	Padang Lawas Utara	23025933	25031223	21309755
21	Padang Lawas	27222308	27263707	23949816
22	Labuhanbatu Selatan	45629961	61294112	59720949
23	Labuhanbatu Utara	24754073	41118873	36192034
24	Nias Utara	12051809	13216312	10475472
25	Nias Barat	10179002	12867069	10653037
26	Sibolga	14132000	16150282	13007847
27	Tanjungbalai	13044678	15316080	18617710
28	Pematangsiantar	25694258	25332212	19548529
29	Tebing Tinggi	0	214866	0
30	Medan	199321137	216767246	139174723
31	Binjai	24319795	20060443	16764725
32	Padangsidempuan	17891011	18526242	14074120
33	Gunungsitoli	11465285	15374623	13474485

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel 4 diatas, DAU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama 2017-2019. Pada tahun 2017, DBH tertinggi dimiliki oleh Kota Medan sebesar Rp 199.321.137.000 dan DBH terendah dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 0. Tahun 2018 DBH tertinggi dimiliki oleh Kota Medan sebesar Rp 216.767.246.000 dan DBH terendah dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 214.866.000. Sedangkan tahun 2019 DBH tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Langkat sebesar Rp 149.951.497.000 dan DBH terendah dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 0. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian DBH di kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih belum maksimal dikelola dengan baik dan efisien. Dengan adanya pemerataan pembangunan disetiap Kabupaten/Kota, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil

pembangunan tersebut (Patadang et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan peneliti adalah untuk melihat Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode data yang bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang diperoleh dari data sekunder time series dari periode 2017-2019 dan cross section sebanyak 25 Kabupaten dan 8kota di Sumatera Utara yang menghasilkan 99 observasi.

Data PAD, Data DAU, Data DBH dan Data PDRB diperoleh dari laporan statistik keuangan daerah provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari situs website resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara yaitu www.sumut.bps.co.id Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kuantitatif. Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut:

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \epsilon_i \quad (1)$$

Estimasi atau pendugaan terhadap persamaan diatas dilakukan dengan melakukan transformasi linier dengan cara menjadikan ke bentuk logaritma natural (ln) sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut:

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \ln \beta_1 PAD_{it} + \ln \beta_2 DAU_{it} + \ln \beta_3 DBH_{it} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

dimana:

$\ln PDRB_{it}$	= log natural PDRB kabupaten/kota
$\ln PAD_{it}$	= log natural PAD kabupaten/kota
$\ln DAU_{it}$	= log natural DAU kabupaten/kota
$\ln DBH_{it}$	= log natural DBH kabupaten/kota
it	= Tahun
β_0	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
e	= kesalahan pengganggu

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), ada beberapa alasan pemilihan model logaritma natural adalah menghindari terjadinya heteroskedastisitas, mengetahui koefisien regresi yang menunjukkan elastisitas dan mendekati skala data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM atau FEM dengan hipotesis yang diuji yaitu :

H_0 : nilai probabilitas $> \alpha$ maka menerima H_0 , artinya model CEM terpilih

H_1 : nilai probabilitas $< \alpha$ maka menolak H_1 , artinya model FEM terpilih Untuk melakukan pemilihan antara CEM atau FEM dapat dilihat melalui p -value pada hasil uji chow dan dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3642.875253	(32,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	732.923632	32	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 5, diperoleh nilai probabilitas chi- square sebesar 0,0000. Dikarenakan model pengujian memiliki nilai probabilitas chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model yang lebih tepat dibandingkan dengan Common Effect Model.

Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara FEM atau REM dengan hipotesis yang diuji sebagai berikut:

H_0 : nilai probabilitas $> \alpha$ maka menerima H_0 , artinya model REM terpilih

H_1 : nilai probabilitas $< \alpha$ maka menolak H_1 , artinya model FEM terpilih

Untuk memilih manakah uji yang paling tepat dilihat dari p -value dan dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.159506	3	0.0470

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 6, diperoleh nilai probabilitas chi- square sebesar 0,0470. Dikarenakan model pengujian memiliki nilai probabilitas chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model yang lebih tepat dibandingkan dengan Common Effect Model.

Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan jika uji Chow mendapatkan hasil

menolak H_0 yang artinya bahwa Fixed Effect Model yang lebih baik dan uji Hausman mendapatkan hasil menerima H_0 yang artinya bahwa Random Effect model yang lebih baik, maka tidak lagi diperlukan uji LM.

3.2 Hasil Estimasi dan Interpretasi

Berdasarkan model yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah model yang menganalisis pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah hasil estimasi model penelitian menggunakan pendekatan model estimasi yang terbaik yakni Fixed Effect Model (FEM):

Tabel 7. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-27.67916	2.914331	-9.497603	0.0000
LOGPAD	-0.022404	0.015180	-1.475844	0.1451
LOGDAU	1.801566	0.142480	12.64432	0.0000
LOGDBH	0.044972	0.016195	2.776921	0.0073
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999726	Mean dependent var	9.126731	
Adjusted R-squared	0.999568	S.D. dependent var	1.313234	
S.E. of regression	0.027284	Akaike info criterion	-4.086584	
Sum squared resid	0.045410	Schwarz criterion	-3.131021	
Log likelihood	234.1993	Hannan-Quinn criter.	-3.700201	
F-statistic	6352.500	Durbin-Watson stat	2.625084	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Berdasarkan tabel 7 hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan hasil estimasi koefisien pada masing-masing variabel berikut:

Koefisien regresi PAD sebesar -0,022404 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1% maka PDRB juga ikut meningkat sebesar 2,2%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan PAD sebesar 1% akan menurunkan PDRB sebesar 2,2%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB.

Koefisien regresi DAU sebesar 1,801566 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan DAU sebesar 1% maka PDRB juga ikut meningkat sebesar 18%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan DAU sebesar 1% akan menurunkan PDRB sebesar 18%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB.

Koefisien regresi DBH sebesar 0,044972 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan DBH sebesar 1% maka PDRB juga ikut meningkat sebesar 4,4%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan DBH sebesar 1% akan menurunkan PDRB sebesar 4,4%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB.

Nilai koefisien determinasi nilai R-squared sebesar 0,999726 atau 99,97%. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berkontribusi terhadap PDRB di Sumatera Utara sebesar 99,97% sedangkan sisanya 0,03% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Nilai nilai Probabilitas dari uji F (F-Statistik) sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara secara signifikan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh PAD terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil penelitian metode Fixed Effect Model tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara. Artinya jika terjadi peningkatan PAD maka tidak akan mempengaruhi peningkatan PDRB karena PAD berfokus pada sumber pendapatan daerah. Karena Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terdapat beberapa Penerimaan Daerahnya yang masih rendah, akan tetapi setiap tahunnya daerah tersebut mengalami peningkatan juga. Tetapi hanya beberapa persen saja dari Kabupaten yang lain dari Penerimaan Asli Daerahnya yang masih rendah yaitu Kabupaten Nias Selatan. Hal ini yang

membuat ketimpang disuatu daerah tinggi dan penduduk masyarakat didaerahnya menjadi tidak makmur dan sejahtera dikarenakan tinggi tingkat ketimpangan disuatu daerah tersebut.

3.3.2 Pengaruh DAU terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan hasil penelitian metode Fixed Effect Model berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara. Artinya jika terjadi peningkatan DAU maka akan meningkatkan PDRB. Hal ini dikarenakan DAU yang diberikan kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pemda dapat menggunakan DAU dengan melandaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat. Namun demikian, DAU akan terbagi habis untuk mengisi kebutuhan gaji pegawai di sebagian besar Pemerintah Daerah dan mengisi celah fiskal yang timbul akibat rendahnya kapasitas fiskal daerah. Terjadi peningkatan alokasi DAU tahun 2019 sebesar 4,60 dibandingkan tahun 2018, dimana peningkatan alokasi DAU disebabkan kenaikan gaji pokok sebesar 5 (lima) persen, adanya DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS yang didaftarkan oleh Daerah dan DAU tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan.

3.3.3 Pengaruh DBH terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan hasil penelitian metode Fixed Effect Model berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara. Artinya jika terjadi peningkatan DBH maka akan meningkatkan PDRB. Nilai DBH yang diperoleh pemerintah daerah sesuai dengan angka presentase. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam, jadi apabila pajak dan sumber daya alam pada daerah tersebut besar, maka pembagian dari hasil pajak dan sumber daya tersebut akan besar pula.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil data yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Ramadhan Devan Pratama, Sirojuzilam Hasyim, Wahyu Ario Pratomo, Irsyad LuRamadhan Devan Pratama, Sirojuzilam Hasyim, Wahyu Ario Pratomo, Irsyad Lubis. 2022. "Analisis Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur Jalan, I. P. M. dan A. K. terhadap P. D. R. B. di P. S. U. . J. K. E. dan K. P. 7(2): 207–19. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/4137/3823>. bi. (2022). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur Jalan, Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 207–219.

Daftar Rujukan

- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4), 1–18.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2017-2019*. Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara Menurut Harga Konstan 2017-2019*. Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Tinjauan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.2019*. Medan
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.2019*. Medan
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provins Sumatera Utara.2019*. Medan
- Ghozali, H. I. & Ratmono D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasinya dengan Eviews-10*. (Edisi 2. Cetakan ke-2) Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kantor, K., & Djpb, W. (2020). *REGIONAL Tiartha Sebayang*.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Www.Penerbitwidina.Com*
- MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 56–71. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.291>
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.35104.22.2.2021>